

## PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MODERN DI SUMENEP 1905-1942

Oleh:  
Irfah Lihifdzi Ayatillah

### Abstrak

Penelitian berjudul *Perkembangan Pendidikan Modern di Sumenep 1905-1942* ini merupakan bagian dari sejarah sosial. Tema ini dipilih karena penelitian mengenai pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial di tingkat lokal masih sedikit ditulis. Padahal, pendidikan juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Penelitian ini membahas pendidikan model kolonial di Sumenep, terutama sejak berlakunya politik etis di Hindia Belanda. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab dilaksanakannya pendidikan modern di Sumenep, bagaimana pendidikan tersebut berlangsung, serta dampaknya bagi keadaan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis dimulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah langkah pencarian dan pengumpulan sumber dan informasi mengenai peristiwa yang sedang diteliti. Verifikasi merupakan proses untuk menguji keaslian sumber dan kredibilitasnya, mulai dari segi fisik maupun isi agar dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, interpretasi dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta yang sudah ditemukan dan diuji agar dapat ditentukan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Terakhir, historiografi adalah proses penulisan yang ditulis berdasarkan fakta telah diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial melaksanakan pendidikan modern di Sumenep untuk kepentingan tenaga kerja murah bagi perusahaan garam milik Belanda. Keberlangsungan pendidikan modern itu sendiri kurang baik karena pemerintah hanya mendirikan sekolah-sekolah rendah di Sumenep. Akan tetapi, pendidikan modern yang berlangsung di Sumenep berdampak pada muncul dan berkembangnya organisasi pergerakan nasional dan menguatnya otoritas kiai. Pendidikan yang berlangsung di Sumenep pada akhirnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak kolonial, namun juga memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk tidak selalu berada di bawah kuasa kolonial.

**Kata Kunci: Pendidikan, Perkembangan, Sumenep.**

## **DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION IN SUMENEP 1905-1942**

By:

Irfah Lihifdzi Ayatillah and Ririn Darini, M.Hum.

NIM. 11407141009 and NIP. NIP. 19741118 199903 2 001

### **Abstract**

The study entitled *Development of Modern Education in Sumenep 1905-1942* is part of social history. This theme was chosen because the research on the colonial education at the local level is still slightly written whereas education is affecting the social and economic aspects of society in the region. This study discusses the colonial model of education in Sumenep, especially since the entry of ethical politics in the Dutch East Indies. This thesis aims to explain the cause of the implementation of modern education in Sumenep, how the education takes place, as well as the impact on the social situation in the region.

This study uses a critical history. Critical historical method starts from heuristics, verification, interpretation and historiography. Heuristics is a step in the search and collection of resources and information about the event being investigated. Verification is a process for testing the authenticity of the source and its credibility, ranging from the physical aspect as well as the contents to be justified for use in the research. Furthermore, the interpretation done to interpret the facts that have been discovered and tested to be determined relevance to the research conducted. Lastly, historiography is the writing process which was written by the facts that have been obtained.

The results of the research indicate that the colonial government implements modern education in Sumenep for the benefit of cheap labor for companies belonging to the Dutch, especially salt. Sustainability of modern education itself is not very good because the government simply set up elementary schools in Sumenep. However, modern education that takes place in Sumenep impacts on the emergence and development of the national movement organization and a stronger kiai's authority. Education that takes place in Sumenep in the end not only provide benefits to the colonial government, but also give effect to the public for not always being under colonial rule.

**Keywords: Development, Education, Sumenep**

## A. Pendahuluan

Sudah menjadi hal yang umum bahwa pemerintah kolonial memfasilitasi pendidikan untuk pribumi demi kepentingan-kepentingan mereka. Ada banyak kebutuhan selama masa kolonial di Hindia-Belanda untuk menyediakan tenaga administrasi, teknik, pertanian, sebagai pekerja-pekerja kelas dua.<sup>1</sup> Artinya, pendidikan masa kolonial tidak dapat dipandang sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa pribumi, namun untuk memenuhi tenaga kerja rendahan.

Pendidikan modern atas prakarsa pemerintah kolonial tidak semerta-merta diterapkan begitu saja. Ada sebuah perjalanan panjang dari sejarah pendidikan modern di Indonesia yang dimulai sejak masa kedatangan bangsa-bangsa asing. Kedatangan bangsa asing dimulai dari bangsa portugis, kemudian kedatangan bangsa Belanda. Kedatangan Belanda di Indonesia dimulai dari *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tiba di nusantara pada awal abad ke-17. VOC merupakan kongsi dagang sehingga mereka mengutamakan perdagangan sebagai tujuan utamanya, sama seperti Spanyol dan Portugis. Berbeda dengan Pemerintah Kolonial Belanda, mereka hanya mementingkan pengambilan kekayaan dari tanah air.<sup>2</sup> Lamanya pemerintah kolonial tinggal dan menetap di Indonesia bahkan membawa serta keluarga mereka, tentu memberikan banyak pengaruh terhadap segala bidang dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Nurul Umami, "Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920", *Laporan Penelitian*, (Jember: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Jember, 1997), hlm. 15.

<sup>2</sup> Sutari Imam Barnadid, *Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 29.

masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut turut menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Seperti yang sudah diketahui, pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak kolonial ternyata hanya untuk kepentingan pihak kolonial semata. Pemerintah melakukan hal tersebut untuk mempersiapkan tenaga administrasi tingkat rendah.<sup>3</sup> Hal yang lebih mengecewakan soal ini adalah tidak meratanya pendidikan.

Untuk wilayah Madura sendiri, setelah tiga tahun diberlakukannya politik etis, baru dibuka beberapa sekolah dasar untuk pribumi dengan lama pendidikan tiga tahun. Hal itu juga hanya dengan memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Namun, pada tahun selanjutnya diadakan seksi bagian kebahasaan Madura, dengan diterbitkan buku-buku berbahasa Madura sehingga banyak anak Madura yang mulai tertarik belajar dan membaca. Hal ini yang menjadi warna baru untuk sedikit meningkatkan dan memajukan pendidikan di Madura. Hal tersebut sebenarnya tidak begitu signifikan memberikan kemajuan karena hampir 93% penduduk Madura masih buta huruf sampai akhir pemerintahan kolonial di Indonesia.<sup>4</sup>

Pendidikan yang berlangsung di Sumenep sendiri, sebenarnya sudah ada sebelum pihak kolonial mendirikan sekolah di sana. Sebagai daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka pendidikan yang berkembang juga

---

<sup>3</sup> Mien A Rifai, *Lintasan Sejarah Madura*, (Surabaya: Lebbur Legga, 1993), hlm. 61.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

hanya lembaga yang mengajarkan Agama Islam, seperti pesantren. Bahkan sampai saat ini pesantren masih berkembang luas.

## **B. Kondisi Umum Sumenep**

Wilayah Madura memiliki lebih dari seratus pulau kecil. Hampir semua pulau-pulau kecil itu terletak di Kabupaten Sumenep.<sup>5</sup> Pulau yang terletak di Kabupaten Sumenep berjumlah 126 pulau, terdiri atas 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Tidak semua pulau tersebut memiliki nama. Dari jumlah 126 pulau, 22 di antaranya belum memiliki nama.<sup>6</sup> Wilayah selain Kabupaten Sumenep yang memiliki pulau lain hanyalah Kabupaten Sampang.

*Afdeeling* Sumenep memiliki luas 2.091 km<sup>2</sup>, termasuk pulau-pulau yang masuk dalam wilayahnya.<sup>7</sup> Wilayah yang dimiliki Sumenep ini lebih luas daripada wilayah lain seperti Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang masing-masing luasnya kurang dari 1500 km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Batas-batas *Afdeeling* Sumenep adalah *Afdeeling* Pamekasan di bagian Barat.<sup>9</sup> Oleh karena Sumenep merupakan *afdeeling* yang paling timur dari

---

<sup>5</sup> Eddy Juwono Slamet, “Madura Masa Lalu, kini dan Masa yang Akan Datang Sebuah Tinjauan Pustaka Perilaku Ekonomi”, dalam Aswab Mahasin (Ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa II; Aneka Budaya di Jawa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), hlm. 16.

<sup>6</sup> H. Mohammad Adib, MA, *Etnografi Madura*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), hlm. 3.

<sup>7</sup> D.G. Stibbe (ed.), *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Vierde Deel*, (Leiden: N. V. v/h. E.J. Brill, 1921), hlm. 12.

<sup>8</sup> Mohammad Adib, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> D.G. Stibbe, *loc.cit.*

pulau Madura, maka di sebelah utara dan timur *afdeeling* ini dibatasi oleh Laut Jawa. Sementara, di sebelah selatannya dibatasi oleh selat Madura.

Wilayah Sumenep hampir keseluruhan terdiri dari bukit-bukit. Di tengah wilayahnya, terdapat satu bukit yang memanjang. Sumenep bagian utara dan selatan terdiri dari bebatuan kapur. Sementara, bagian timur *afdeeling* ini merupakan dataran rendah yang banyak dijadikan tambak garam.<sup>10</sup> Curah hujan di Sumenep sebanyak 1700 mm per tahun, hampir sama dengan wilayah-wilayah lain di sepanjang utara Jawa. Sepanjang bulan Juli dan Agustus curah hujan di Sumenep terhitung sangat sedikit. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat di sepanjang wilayah pantai daerah selatan ibu kota Sumenep banyak menjadi produsen garam pada waktu-waktu tersebut.<sup>11</sup>

### **C. Pendidikan Modern di Sumenep 1905-1942**

Abad ke-20 menjadi awal mula berkembangnya berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat di Hindia Belanda. Perkembangan tersebut terlihat mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan yang memiliki peranan penting dalam perubahan-perubahan tersebut. Perusahaan-perusahaan Eropa mulai mengalami kemajuan pesat di Hindia-Belanda. Hal tersebut menyebabkan perusahaan membutuhkan pekerja-pekerja terdidik dan memiliki keahlian tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 23.

Sebelum masa politik etis, pihak kolonial tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan. Pihak kolonial memiliki alasan untuk tidak diberikannya pendidikan bagi pribumi, salah satunya adalah kekhawatiran mereka akan terganggunya adat-kebiasaan masyarakat Indonesia. Selain itu, yang lebih dikhawatirkan pihak kolonial adalah orang-orang pribumi akan merasa setara dengan orang-orang Belanda setelah mereka mendapat pendidikan dan menguasai kebudayaan, pengetahuan serta organisasi Barat.<sup>13</sup>

Perubahan sistem birokrasi yang terjadi tahun 1883 di Sumenep tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan. Begitu pula sebelum perubahan birokrasi di Sumenep terjadi, hanya ada satu sekolah di Sumenep yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebangsaan Eropa. Pada tahun 1881 jumlah murid yang terdaftar di sekolah tersebut sebanyak 64 orang.<sup>14</sup>

Kaum pribumi pada umumnya kemudian mendapat kesempatan belajar di bangku sekolah hanya untuk kepentingan perusahaan Belanda yang membutuhkan pekerja-pekerja terdidik. Pada akhir abad ke-19 tepatnya tahun 1893, berdasarkan pembaruan pendidikan, terjadi pembagian sekolah-sekolah pribumi ke dalam sekolah-sekolah Kelas Satu dan sekolah-sekolah Kelas Dua untuk melayani pihak-pihak

---

<sup>13</sup> Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Jemmars, 1983), hlm. 17.

<sup>14</sup> *Koloniaal Verslag van 1882*, bijlage Q, hlm. 1-2.

atas.<sup>15</sup> Dengan demikian, anak-anak bangsawan tidak harus masuk *Europeesche Lagere School* (ELS) karena sekolah untuk pribumi telah dibedakan untuk dua golongan.

Pada awal abad ke-20, belum ditemukan data statistik dan data khusus mengenai kemampuan membaca dan menulis orang-orang Madura, terlebih data khusus untuk Sumenep. Hanya saja diketahui bahwa kepala-kepala desa di Madura masih banyak yang tidak mengenal alfabet romawi, meskipun mereka betul-betul paham aksara Jawa dan Arab. Sebuah laporan tahun 1911 mencatat bahwa kepala-kepala desa di daerah Sumenep lebih sedikit yang *melek* huruf daripada kepala-kepala desa di daerah Pamekasan.<sup>16</sup>

Penerapan kebijakan politik etis ternyata hanya memberikan anggaran 5 sen per orang untuk pendidikan. Sementara, untuk kepentingan perang perluasan wilayah dianggarkan 125 sen per orang. Melalui perbandingan tersebut, dapat ditengarai bahwa pihak kolonial tidak serius memperhatikan pendidikan.<sup>17</sup> Anggaran yang tidak begitu berarti tersebut menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Madura.

Sekolah untuk pribumi di Sumenep sendiri sudah ada sejak 1864. Hanya saja, Panembahan Natakusuma II yang saat itu berkuasa tidak begitu memberikan perhatian yang antusias terhadap bidang pendidikan, sehingga sekolah tersebut

---

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Agraris dalam Masyarakat Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm 451.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 452.

<sup>17</sup> Mien A. Rifai, *op. cit.*, hlm. 61.



ditutup. Padahal, sekolah tersebut belum genap setahun berdiri. Tiga tahun setelahnya, tepatnya tahun 1867, sekolah serupa kembali dibangun, namun kejadian sebelumnya kembali terjadi. Sekolah yang didirikan tersebut tidak meningkatkan minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Hal ini juga disebabkan oleh kaum bangsawan yang lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang sebenarnya untuk anak-anak Belanda. Hal ini dibuktikan dengan putra panembahan sendiri yang memilih bersekolah di *Europeesche Lagere School* (ELS) daripada di sekolah pribumi yang sudah disiapkan.<sup>18</sup>

Tidak ada data yang menyebutkan kapan pendidikan di Sumenep dimulai lagi setelah ditutupnya sekolah yang didirikan pada tahun 1867 itu. Selama kurang lebih 19 tahun tidak ada kepedulian yang berarti dari pemerintah pada bidang pendidikan. Pada tahun 1886 pemerintah mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak bupati. Pemerintah kolonial mendukung sekolah tersebut dengan cara mengirim seorang berkebangsaan Eropa yang kemudian menjabat sebagai kepala sekolah. Pihak kolonial sengaja mengirim orang tersebut untuk mendidik anak-anak dan kerabat bupati di Sumenep. Namun demikian, kejadian yang sama terjadi, sekolah tersebut pada akhirnya ditutup disebabkan oleh keterbatasan para guru.<sup>19</sup>

Selain itu, laporan residen tahun 1923 juga menyebutkan bahwa sudah ada lima sekolah Cina dan Arab di Sumenep. Namun demikian, laporan ini tidak mencatat

---

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, 2002, *op. cit.*, hlm. 188-192.

<sup>19</sup> *Koloniaal Verslag van 1887*, hlm. 93-94.

adanya sekolah pribumi di Sumenep. Hanya ada dua sekolah pribumi dan keduanya ada di Madura, yang terletak di Bangkalan.<sup>20</sup> Sekolah-sekolah tersebut juga bukan merupakan sekolah yang dibangun oleh pemerintah melainkan sekolah yang dibangun oleh orang-orang pribumi, atau yang disebut dengan sekolah partikelir.

#### **D. Dampak Pendidikan Modern di Sumenep**

Politik etis berdampak bagi perkembangan pendidikan kolonial di Sumenep. Sementara, pendidikan jenis itu juga memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di sana. Sementara pendidikan tradisional tidak secara jelas memberikan dampak, selain meluasnya pendidikan agama di Sumenep. Pendidikan modern berdampak pada berbagai bidang, seperti berkembangnya organisasi pergerakan nasional, munculnya elite modern, dan menguatnya otoritas kiai. Selain dampak sosial tersebut, dampak pendidikan juga tampak dalam bidang ekonomi, yaitu banyaknya tenaga kerja murah untuk monopoli garam.

Dampak-dampak pendidikan tersebut tidak hanya merupakan dampak yang baik bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dampak pendidikan kolonial di Sumenep. Berikut dampak sosial, ekonomi, maupun politik atas diterapkannya pendidikan di Sumenep.

---

<sup>20</sup> F. B. Batten, “Memori Residen Madura (F. B. Batten)”, dalam ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978), hlm. 213.

## **E. Kesimpulan**

Pendidikan di Sumenep berlangsung sekedarnya saja, untuk menghasilkan tenaga kerja murah. Bertepatan dengan itu, masyarakat juga kurang memiliki animo yang baik dalam menyambut pendidikan di Sumenep. hal ini salah satunya disebabkan dengan adanya pilihan bagi masyarakat untuk dapat belajar di pesantren. Selain itu, sekolah-sekolah milik pemerintah juga tidak merata, karena hanya terfokus di ibu kota kabupaten saja. Sementara itu, Sumenep banyak memiliki pulau-pulau kecil yang tidak terjamah pendidikan. Dengan demikian, pada pertengahan abad ke-20 muncul sekolah-sekolah partikelir yang banyak tersebar di pulau-pulau, seperti di Pulau Arjasa, Gayam, Sapeken, dll.

Pendidikan pemerintah dan partikelir di Sumenep terbatas pada pendidikan rendah saja, seperti Sekolah Desa, Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu, HIS (*Hollands Inlandsche School*), dan ELS (*Europeesche Lagere School*). Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah yang memiliki jenjang yang sama, namun tidak setara secara kualitas. Sekolah Desa hanya mendapat pelajaran-pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan atau kerajinan tangan. Sekolah Kelas Dua tidak jauh berbeda dengan Sekolah Desa, hanya saja setelah beberapa tahun berjalan, ada perubahan untuk menyamakan pelajaran Sekolah Kelas Dua dengan Sekolah Kelas Satu, yang mendapat pelajaran Bahasa Belanda dan beberapa pelajaran yang lebih kompleks.

Seiring berjalannya waktu, Sekolah Kelas Satu juga mulai diubah namanya dengan sebutan HIS. Bersamaan dengan hal tersebut, Bahasa Belanda dijadikan

bahasa pengantar untuk sekolah jenis ini. Sementara itu, ELS menjadi satu-satunya sekolah yang sejak awal memiliki fasilitas dan kualitas yang paling baik. Pelajaran Bahasa Belanda sejak awal sudah diberikan karena sekolah ini memang ditujukan untuk anak keturunan Belanda.

Dinamika pendidikan yang berlangsung di Sumenep tentu saja juga memberikan dampak dalam masyarakat. Dampak langsung pendidikan di Sumenep ada berkembangnya organisasi pergerakan nasional. Sarekat Islam (SI) merupakan salah satu organisasi pergerakan yang cukup menunjukkan kesadaran masyarakat pribumi akan nasionalisme. Dalam struktur kepengurusan SI, dapat dilihat keterlibatan masyarakat yang berprofesi sebagai guru, administrator, kasir, *mantri*. Profesi-profesi ini tentunya dimiliki orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan karena menuntut kemampuan baca dan tulis. SI juga menunjukkan adanya dampak pendidikan yang tidak disadari pemerintah kolonial. Hal tersebut akhirnya memberikan tekanan-tekanan bagi pemerintah, paling tidak pihak kolonial mulai merasa bahawa posisinya terancam.

Selain organisasi pergerakan nasional, pendidikan juga memberikan dampak bagi keadaan sosial masyarakat dengan munculnya elite modern. Kalangan terdidik mulai menjadi kelompok baru dalam masyarakat, seperti guru, pegawai pemerintah, maupun kasir-kasir yang bekerja di pabrik garam. Setelah berjalannya pendidikan modern di Sumenep yang sengaja diterapkan untuk kepentingan kolonial, tenaga kerja terdidik yang murah berhasil diserap oleh pemerintah. Namun demikian, hal tersebut tidak begitu saja memberikan kenyamanan bagi pihak kolonial. Dampak

pendidikan tidak hanya mendukung pihak kolonial, melainkan juga memberatkan posisi pemerintah dengan adanya kelompok baru dalam masyarakat yang sadar organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Terbitan Resmi

ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.

*Koloniaal Verslag van 1882*

*Koloniaal Verslag van 1887.*

Stibbe, D.G. (ed.), *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Vierde Deel*, (Leiden: N. V. v/h. E.J. Brill, 1921

### Buku dan Artikel

Eddy Juwono Slamet, “Madura Masa Lalu, kini dan Masa yang Akan Datang Sebuah Tinjauan Pustaka Perilaku Ekonomi”, dalam Aswab Mahasin Ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa II; Aneka Budaya di Jawa*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996.

Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*, Yogyakarta: Matabangsa, 2002.

Mien A Rifai, *Lintasan Sejarah Madura*, Surabaya: Lebbur Legge, 1993.

Mohammad Adib, MA, *Etnografi Madura*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.

Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Penerbit Jemmars, 1983.

Sutari Imam Barnadi, *Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

**Skripsi dan Laporan Penelitian**

Nurul Umamah, *Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920*, Laporan Penelitian, Jember: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Jember, 1997.

Pembimbing



Ririn Darini, M.Hum.

NIP. 19741118 199903 2 001

Yogyakarta, 1 Oktober 2015

Reviewer



Danar Widiyanta, M.Hum

NIP. 19681010 199403 1 001